



UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA

Kantor Pusat Koordinasi Dalam Negeri, Jalan Mapilema, Wamena Lani-Pago West Papua.

Email: ulmwpooffice@gmail.com, Mobile Phone +6285244442502

Pernyataan Sikap United Liberation Movement for West Papua

Kami terus memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat dan Bangsa Papua Sebagai Solusi Demokratis!

Pasca kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, setelah Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia di tahun 1949, West Papua mulai menjadi wilayah yang diperebutkan antara pihak Indonesia (- serta kroni-kroninya-) dan Belanda. Konferensi Meja Bundar (KMB), Konferensi Bandung yang membahas tentang status West Papua tidak ditemukan jalan keluar. Hingga tahun 1951 pada Kabinet Ke-2 dari Perdana Menteri Drees mengakui “Hak Kemerdekaan Papua,” sesuai dengan Pasal 73 Piagam PBB, yang berbunyi: *“All people have the Right to self determination regardless of their state of development.”* Berdasarkan Pengakuan ini, maka pada akhir tahun 1959, Belanda mulai mempersiapkan proses Dekolonisasi West Papua. Tahapan proses dekolonisasi dimulai dengan pembentukan Pasukan Sukarelawan Papua (PVK: Papoea Vrijlijers Korps); pembentukan Nieuw Guinea Raad (NGR) dan Komite Nasional Papua (1961).

Seluruh proses ini kemudian melahirkan rancangan tentang Negara West Papua beserta atributnya: Bendera Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, Lambang Negara “Burung Mambruk”, Nama Negara “West Papua/Papua Barat”, Motto “One People One Soul”, Mata Uang “Nieuw Guinea Golden”), dan pada 01 Desember 1961 secara de facto diproklamkan, dengan ditandai pengibaran Bendera Bintang Kejora dan lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan. Pelaksanaan Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Nyanyian Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” disiarkan melalui radio Belanda dan Australia serta diberitakan melalui media New York Times, 3 Desember 1961.

Kemerdekaan Bangsa Papua kemudian dianeknisasi oleh Pemerintah Indonesia melalui cara-cara yang licik dan Inkonstitusional; melalui, (1) Pemakluman TRIKORA, 19 Desember 1961, diikuti dengan serangkaian Operasi Militer dan transmigrasi. (2) Penandatanganan New York Agreement, 15 Agustus 1962, yang cacat Hukum karena tidak melibatkan wakil Bangsa Papua yang dipersengketakan. (3) Penyerahan West Papua secara sepihak kepada Pemerintah Indonesia, 1 Mei 1963. (4) Pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat Hukum Internasional karena tidak sesuai dengan New York Agreement, yakni sistem One Man One Vote. Sistem tersebut malahan diganti oleh Pemerintah Indonesia dengan sistem Musyawarah melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dimana dari 800-an ribu jiwa penduduk Papua hanya 1025 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia. Inilah alasan mengapa sekalipun proyek mengindonesiakan OAP (Orang Asli Papua) berlangsung hingga memasuki 57 tahun, rakyat West Papua tetap pada pendirian awal bahwa tetap memperjuangkan keluar dari Negara Kolonial Indonesia.

Selain itu, penandatanganan kontrak karya pada April 1967 dimana Freeport hadir di tanah Papua 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969. Hal ini menjelaskan bahwa perebutan wilayah Papua bermotif perebutan sumber-sumber ekonomi.

Selama 50 tahun eksploitasi telah mengakibatkan kejahatan kemanusiaan dan bencana ekologi pada rakyat Papua khususnya Suku Amungme dan Kamoro. Fakta telah memperlihatkan bahwa akibat operasi pertambangan Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan, membuat sungai meluap karena endapan *tailing* yang termasuk kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Selain itu, penduduk asli semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat mereka dirampas. Sekali lagi masuknya Freeport di West Papua hanya memberi ruang bagi aparat keamanan membangun bisnisnya, membantai, menculik, memperkosa, menganiaya rakyat Papua dan membakar kampung-kampung guna menjaga basis-basis operasi modal. PT. Freeport dan pemilik modal besar Amerika serta kolonialisme dan militerisme Indonesia di West Papua merupakan satu kesatuan yang menjunjung rangkaian penindasan yang sistematis di West Papua.

Semenjak Hak kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 1961 dianeksasi oleh Indonesia telah terjadi beragam operasi militer yang dilancarkan untuk membungkam gerakan perlawanan Rakyat West Papua yang menolak kehadiran Indonesia dengan

kekuasaan Investasi, saham, politik kolonial, militerisme, Imprealisme di tanah West Papua. Alat Negara dalam menumpas rakyat West Papua saat ini adalah Militer menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat West Papua. Dari masa kepemimpinan Ir. Soekarno hingga Joko Widodo / Jusuf Kalla, Militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat West Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat West Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia. Dengan itu pun, Aspirasi dan ruang demokrasi untuk rakyat, pemuda/mahasiswa Papua sedang dibungkam habis-habisan oleh kolonial Indonesia.

Hingga saat ini, gerakan-gerakan perlawanan Rakyat West Papua terus dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamankan West Papua menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Pada hal status politik rakyat West Papua belum terselesaikan.

Hal tersebut merupakan sebuah cerminan daripada kolaborasi Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme yang diaplikasikan melalui praktik penggabungan paksa West Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya

Setelah perjalanan panjang, yang telah memakan banyak korban berjatuhan, Rakyat bangsa Papua masih terus memperjuangkan Hak Politiknya Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri. Hingga decade ini, memasuki 1 Desember 2018, melalui wadah Politik bangsa Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang lahir melalui Deklarasi Saralana pada 6 Desember 2014 di Port Vila Negara Republik Vanuatu berdasarkan saran konstruktif para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG), ULMWP dari waktu ke Waktu Terus menggalang dukungan internasional, Indonesia dan rakyat bangsa West Papua untuk mewujudkan hak politik bangsa Papua yang telah dianeksasi melalui TRIKORA (Tri Komando Rakyat).

Hasil kerja keras ULMWP selama 4 tahun ini terus mengalami kemajuan di regional Melanesia, Pacifik hingga di Kancah Internasional. Kita telah menyaksikan dalam kurun waktu yang sama, para pemimpin negara-negara pacific yang tergabung dalam Pacific Islands Coalition on West Papua serta wakil Perdana Menteri/menteri Luar

Negeri St. Vincent dan Granadat berdebat dalam sidang umum PBB. Ke depan ULMWP terus akan kerja lebih keras sembari merawat persatuan nasional West Papua yang telah dicapai melalui ULMWP. Maka, bertepatan dengan momentum Peringatan 01 Desember sebagai hari Manifesto Politik Kemerdekaan Rakyat dan Bangsa West Papua ini, ULMWP menyampaikan kepada:

1. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan Pemerintahan Presiden Jokowi/Jusuf Kalla untuk Mengakui status politik bangsa West Papua yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dengan kembalikan hak Manifesto politik Bangsa West Papua.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertanggung jawab atas kesalahan masa lalunya (1961-1969) di West Papua serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri.
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencabut Resolusi nomor 2504 tahun 1969 tentang mencatat (note note) laporan sekretaris Jenderal PBB di West Papua dan bantuan pelaksanaan pembangunan di West Papua melalui Bank Pembangunan Asia kepada Pemerintah Indonesia dalam usaha-usahanya untuk menunjukkan perkembangan ekonomi dan sosial di West Papua dan mendesak negara-negara anggota PBB untuk memberikan suara melalui sidang umum PBB bagi Resolusi baru untuk mengembalikan kembali kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah merdeka, pada 1 Desember 1961 sesuai mekanisme hukum Internasional.
4. Mendesak Pemerintah Kerajaan Belanda untuk mendukung Resolusi Baru West Papua ke PBB sebagai beban masa lalu yang kini menjadi petaka kemanusiaan di West Papua.
5. Meminta kepada Amerika Serikat dan Sekutunya mendorong dan mendukung Resolusi baru bagi Papua Barat sebagai Bapak Pembina Demokrasi dan Polisi dunia bagi pemenuhan Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua.
6. Pemerintah Indonesia untuk menarik seluruh pasukan Militer organik maupu non-organik dari seluruh tanah air West Papua.
7. Menutup Operasi PT. Freeport, British Petroleum, (BP), Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh, MNC, (Merauke Integrated Food and Energi Estate) MIFEE, dan lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua.
8. Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi dan akses seluas-luasnya bagi kunjungan wartawan asing, pelapor khusus HAM PBB, Pekerja Kemanusiaan, Akademisi, diplomat, anggota Senat/Kongres di West Papua.
9. Meminta Intervensi Internasional bagi Kemanusiaan di West Papua atas situasi kejahatan kemanusiaan di West Papua atas Manusia dan Sumber Daya Alam dari

ancaman Imperialisme, Kolonialisme, Militerisme, Ekstrimisme dan Politik Rasialisme Indonesia atas rakyat bangsa Melanesia di West Papua.

10. Ucapan Terima Kasih:

Pada Momentum memperingati kemerdekaan bangsa Papua, yang ke-57 ini kami menyampaikan Ucapan Terima Kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) atas keputusan KTT MSG di Port Moresby Februari 2018 atas status ULMWP di MSG. Oleh karena itu, kami berharap Direktur Jenderal MSG yang berkantor pusat di Port Vila Vanuatu untuk memproses status keanggotaan ULMWP di MSG sesuai dengan keputusan para pemimpin MSG.
2. Seluruh pemimpin Negara-Negara Pasifik secara khusus Negara-negara yang tergabung dalam PICWP (Pacifik Islands Coalitions on West Papua) yang terus mendorong masalah West Papua dalam Komunike KTT PIF serta dalam debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dalam Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Para duta besar dan menteri luar Negeri Afrika Caribia dan Pasifik atas perhatian dalam menyikapi masalah West Papua.
4. Para pemimpin Parlemen Afrika, Carebian, Pasifik dan Uni Eropa, pada 2016 di Negara Republik Vauatu dimana telah menyampaikan keprihatinan atas masalah kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua.
5. Para pemimpin Gereja-Gereja Pasifik (PCC) dan para Cardinal Gereja Katolik serta para Uskup Gereja Katolik Pasifik, PIANGGO (Pacific Islands non government organisation), para pemimpin Adat, pemimpin Perempuan, Media Masa, Akademisi, Mahasiswa serta seluruh rakyat Pasifik (Melanesia, Polinesia, Micronesia, Australia dan New Zealand) serta komunitas Internasional yang terus mendukung dan menyerukan penghatian besar atas dihentikannya kejahatan kemanusiaan serta dilaksanakannya hak penentuan nasib sendiri di West Papua.
6. Secara khusus kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas dukungan Solidaritas Rakyat Indonesia melalui organisasi maupun secara pribadi bagi kejahatan kemanusiaan serta hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
7. Kepada rakyat Papua dimanapun berada untuk tetap menjaga diri, menjaga persatuan dalam melaksanakan dan memperjuangkan perwujudan hak penentuan nasib sendiri.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, pembungkaman, penindasan dan penghisapan, terhadap Rakyat dan Bangsa West Papua.

Jayapura West Papua, 01 Desember 2018

Koordinator Umum

Simion Daby

**Penanggung Jawab Umum
Unted Liberation Movement for West Papua**

Markus Haluk

Direktur Eksekutif In West Papua